



## **REFORMASI BIROKRASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH**

**Sabrina Birri Sintia<sup>1</sup>, Najua Fauzani<sup>2</sup>, Irhas Khasais<sup>3</sup>, Rizka Maydikta<sup>4</sup>, Mutiara Putri Syahrani<sup>5</sup>, Adinda Salsabila Rizki<sup>6</sup>, Dwi Khusnatun Nisa<sup>7</sup>, Ayu Nur Safitri<sup>9</sup>, Irma Yunita<sup>9</sup>, Ana Mentari<sup>10</sup>, Febra Anjar Kusuma<sup>11</sup>**

*Email : [sabrinabirrisintia@gmail.com](mailto:sabrinabirrisintia@gmail.com)*

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi penulis: [sabrinabirrisintia@gmail.com](mailto:sabrinabirrisintia@gmail.com)*

**Abstrack : Bureaucratic Reform and the Performance of Local Governments in the Implementation of Regional Autonomy:** *This study examines the urgency of bureaucratic reform to strengthen the performance of local governments in implementing regional autonomy. Regional autonomy provides greater authority for local governments to manage development, public services, and fiscal resources based on local needs, yet its implementation continues to face serious challenges. Using a literature review method, this study analyzes theoretical perspectives, empirical findings, and institutional constraints that affect regional government performance. The findings show that bureaucratic reform is crucial to overcoming structural weaknesses such as hierarchical culture, corruption, low competence, political intervention, and ineffective public services. These challenges significantly hinder the realization of quality public services, equitable development, and fiscal independence. The study highlights that bureaucratic reform must involve strengthening human resources, simplifying structures, improving governance systems, and encouraging innovation to build a transparent, accountable, and performance-oriented local government. The implications of this study emphasize the need for continuous reform to ensure that regional autonomy can function optimally and contribute to sustainable development.*

**Keywords:** *Bureaucratic Reform; Local Government Performance; Public Services; Regional Autonomy; Governance*

**Abstrak : Reformasi Birokrasi Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah :** Penelitian ini mengkaji urgensi reformasi birokrasi dalam memperkuat kinerja pemerintah daerah pada penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan, pelayanan publik, dan sumber daya fiskal sesuai kebutuhan lokal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis perspektif teoretis, temuan empiris, serta kendala kelembagaan yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sangat penting untuk mengatasi kelemahan struktural seperti budaya hierarkis, korupsi, rendahnya kompetensi aparatur, intervensi politik, dan pelayanan publik yang belum efektif. Tantangan tersebut menghambat terwujudnya pelayanan berkualitas, pemerataan

---

*Received Desember, 2025; Revised Desember, 2025; Accepted Desember, 2025*

\* Sabrina Birri Sintia, [Sabrinabirrisintia@gmail.com](mailto:Sabrinabirrisintia@gmail.com)

## REFORMASI BIROKRASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH

pembangunan, dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus mencakup penguatan SDM, penyederhanaan struktur, perbaikan tata kelola, serta penumbuhan inovasi agar pemerintahan daerah dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja. Implikasi penelitian menekankan pentingnya keberlanjutan reformasi untuk memastikan otonomi daerah berjalan optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Kinerja Pemerintah Daerah; Otonomi Daerah; Pelayanan Publik; Reformasi Birokrasi

### LATAR BELAKANG

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan fase penting dalam proses demokratisasi setelah masa pemerintahan yang sangat sentralistik. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat sesuai aspirasi dan karakteristik lokal. Tujuannya adalah mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan efisiensi layanan publik agar daerah dapat berkembang berdasarkan potensi dan kebutuhan masing-masing<sup>1</sup>. Dalam sektor pendidikan, otonomi daerah memberi ruang bagi lahirnya kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi lokal, seperti inovasi kurikulum, penguatan muatan lokal, dan penyesuaian pendidikan karakter dengan dinamika sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih responsif dan partisipatif<sup>2</sup>. Pada aspek sosial-keagamaan, otonomi daerah memungkinkan kegiatan dakwah yang lebih kontekstual karena dapat disesuaikan dengan budaya serta kebutuhan masyarakat setempat, dan pemerintah daerah dapat mendukungnya melalui berbagai program pembinaan umat<sup>3</sup>.

Otonomi daerah juga membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan program pemberdayaan muslimah, pendidikan komunitas, serta peningkatan kapasitas sosial yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan daerah. Meski demikian, penerapan otonomi daerah menghadapi tantangan seperti potensi munculnya politik identitas yang dapat memengaruhi objektivitas kebijakan lokal. Namun, apabila dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, otonomi daerah tetap menjadi instrumen penting bagi penguatan pemerintahan lokal yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>4</sup>.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber relevan seperti buku, jurnal, dan dokumen ilmiah lainnya. Metode ini dilakukan dengan menghimpun serta mengompilasi

---

<sup>1</sup> Ade Lestari, "Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 1 (2024): 77–91.

<sup>2</sup> Durotun Nasihah, Anis Fauzi, and Abdul Muin, "Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan," *Jurnal Ilmu Kependidikan* 12, no. 1 (2023): 19–28, <https://doi.org/10.33506/jq.v12i1.2238>.

<sup>3</sup> A. M. Yati, "Strategi Da'i Perkotaan Dalam Mengimplementasikan Syariat Islam Secara Kaffah Di Kota Banda Aceh," *JURNAL AT-TAUJIH BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM* 4, no. 1 (2021): 49–70.

<sup>4</sup> Adrian, Syarifuddin Jurdi, and Syahrir Karim, "Gagasan Politik Wahdah Islamiyah Dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024," *Jurnal Studi ALQURAN-HADIS Dan Pemikiran Islam*, 2025, 2745–3812.

hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan topik sehingga peneliti memperoleh landasan konseptual yang kuat. Menurut Creswell, kajian literatur merupakan rangkuman sistematis dari teori dan temuan masa lalu maupun masa kini yang disusun ke dalam topik-topik yang relevan<sup>5</sup>.

Dengan demikian, studi literatur tidak hanya menjadi sumber data, tetapi juga memperkaya pemahaman peneliti terhadap konteks penelitian serta memperkuat argumentasi konseptual yang dibangun. Cara ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi perkembangan terbaru, menemukan celah penelitian, dan memastikan analisis tetap sesuai dengan perkembangan ilmu<sup>6</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat birokrasi saat ini masih jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Permasalahan utama berakar dari warisan sistem birokrasi kolonial Belanda yang sangat hierarkis, feodalistik, dan berorientasi pada kekuasaan, bukan pada pelayanan rakyat. Akibatnya, hingga kini masih banyak aparatur yang merasa sebagai penguasa, bukan sebagai abdi negara. Budaya birokrasi seperti ini telah mengakar selama puluhan bahkan ratusan tahun sehingga sulit diubah secara cepat, namun tetap dapat diperbaiki apabila terdapat political will yang kuat dari pimpinan negara serta komitmen seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan mendasar. Berbagai praktik buruk seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, red tape, dan mental feodal memperparah kualitas birokrasi sehingga pelayanan publik menjadi lamban dan mahal.

Upaya reformasi birokrasi, kesinambungan dan peningkatan berkelanjutan merupakan faktor penting agar birokrasi mampu merespons perubahan zaman. Di tingkat pusat maupun daerah, pembaruan perlu dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan pengelolaan SDM yang lebih modern. Reformasi harus selaras dengan penyesuaian tugas serta fungsi organisasi pemerintahan agar tetap efektif mengikuti dinamika perubahan yang sangat cepat<sup>7</sup>.

Salah satu alasan paling mendesak perlunya reformasi adalah pemberantasan korupsi yang telah menjadi penyakit kronis dalam tubuh birokrasi Indonesia. Bidang pelayanan publik merupakan area paling rawan korupsi, terlihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pungli yang menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif dan tidak efisien<sup>8</sup>. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta program kesejahteraan justru hilang akibat praktik suap, mark up anggaran, pemotongan bantuan sosial, jual beli jabatan, sampai pungli di layanan administrasi. Korupsi tidak hanya

---

<sup>5</sup> Rizal Seota Wahyu Hartanto and Hasan Dani, "STUDI LITERATUR : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN SOFTWARE AUTOCAD Rizal," *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan* 6, no. 1 (2020).

<sup>6</sup> Habsy, "Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur," *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1 (2017): 90–100.

<sup>7</sup> Sri Wulandari, "Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era Society 5.0.," *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4 (2023): 51–61.

<sup>8</sup> Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi : Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>.

## REFORMASI BIROKRASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH

terjadi di pusat, tetapi merambah hingga provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan desa.

Masalah mendasar lainnya adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Masyarakat masih sering menghadapi kesulitan dalam mengurus KTP, KK, akta kelahiran, sertifikat tanah, izin usaha, dan administrasi lainnya. Prosedur yang panjang, persyaratan yang sering berubah, waktu penyelesaian yang tidak jelas, hingga sikap petugas yang kurang ramah masih menjadi keluhan utama. Praktik pungli yang mengharuskan masyarakat membayar lebih agar layanan cepat selesai semakin memperburuk keadaan, terutama bagi warga kecil yang tidak memiliki akses maupun biaya tambahan. Akibatnya, penggunaan jasa calo masih marak. Kondisi tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek hukum, struktur kelembagaan, prosedur kerja, kebijakan, dan budaya organisasi<sup>9</sup>. Urgensi reformasi juga terlihat dari sistem manajemen SDM yang belum optimal. Sistem gaji dan remunerasi belum mencerminkan beban dan prestasi kerja, sehingga tidak memberi insentif bagi pegawai berkinerja baik. Penilaian kinerja masih bersifat formalitas dan tidak menjadi dasar promosi atau sanksi, sementara pengembangan kompetensi melalui diklat belum berjalan efektif dan tidak merata. Semua ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan aparatur yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

### **B. Tantangan Utama Birokrasi Daerah**

Birokrasi di tingkat daerah menghadapi tantangan besar akibat dominasi politik yang memengaruhi netralitas serta profesionalisme para pejabatnya. Ketika proses politik berlangsung, birokrasi sering terlibat dalam kepentingan tertentu sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Situasi ini menghambat upaya reformasi karena kepentingan politik yang saling bersaing menyulitkan penerapan perubahan struktural dan prosedural secara konsisten. Rendahnya profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia semakin memperberat kondisi, mengingat masih banyak pejabat yang tidak memiliki kompetensi memadai. Sistem kepegawaian pun belum berbasis prestasi sehingga penempatan pegawai dan pengembangan karier sering tidak mencerminkan kemampuan, yang akhirnya melahirkan birokrasi besar namun kurang efektif. Paradigma kerja tradisional yang sangat prosedural dan hierarkis turut memperlambat respons birokrasi terhadap kebutuhan publik serta menghambat inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Penerapan desentralisasi juga menunjukkan bahwa tidak semua daerah siap mengelola kewenangannya dengan baik. Lemahnya pengawasan dan minimnya koordinasi memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi menjadi rendah karena dianggap kurang transparan dan responsif. Upaya digitalisasi pun belum optimal akibat keterbatasan penguasaan teknologi dan ketimpangan infrastruktur. Kombinasi faktor tersebut menandakan bahwa peralihan menuju birokrasi modern masih membutuhkan peningkatan kapasitas, transformasi budaya kerja, serta profesionalisme aparat<sup>10</sup>.

Simplifikasi birokrasi di Indonesia juga menghadapi hambatan berupa kuatnya patrimonialisme dalam struktur pemerintahan. Relasi kerja yang dibangun atas dasar

---

<sup>9</sup> M. T. Haning, "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik.," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2018, 25–37.

<sup>10</sup> Bambang Irawan et al., "REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE," *JPA (Journal of Public Administration)* 7 (2021): 1–17.

kedekatan pribadi dan loyalitas menyulitkan proses transformasi menuju birokrasi modern. Ketergantungan pada pola hierarki tradisional menghambat peralihan dari jabatan struktural ke fungsional, sehingga tujuan menciptakan birokrasi yang lebih sederhana dan responsif belum tercapai optimal. Reorganisasi fungsi pasca pengurangan posisi struktural pun belum berjalan baik, menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja serta potensi kekosongan pada bidang tertentu. Tantangan lain muncul dari kesenjangan kompetensi pegawai dalam menjalankan jabatan fungsional. Tidak semua ASN memiliki keterampilan teknis yang diperlukan, sementara pelatihan dan pendampingan belum tersebar merata. Budaya kerja paternalistik dan minim orientasi kinerja semakin memperlambat adaptasi terhadap pola kerja baru. Tanpa pembentukan budaya organisasi yang profesional dan modern, penyederhanaan birokrasi berisiko hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan perbaikan berarti

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi turut menghadapi kendala koordinasi dan kesiapan institusi di tingkat pusat dan daerah. Tidak semua instansi memiliki sumber daya, pemahaman, atau sistem pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan re-echeloning secara efektif. Penguatan sistem merit pun belum berjalan konsisten sehingga praktik patronase masih memengaruhi penempatan pegawai dan pengambilan keputusan. Jika sistem merit tidak diperkuat, perubahan struktural tidak akan membawa peningkatan kualitas layanan publik, dan reformasi birokrasi hanya berhenti pada perubahan administratif<sup>11</sup>.

### **C. Dampak Tantangan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah membawa harapan besar bagi percepatan pembangunan dan kemandirian ekonomi lokal, tetapi masih menghadapi tantangan struktural yang memengaruhi efektivitasnya. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hambatan utama, terutama terkait kemampuan perencanaan, pengelolaan anggaran, dan implementasi program. Banyak aparat daerah belum mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program yang efektif, sehingga pembangunan berjalan lambat atau tidak tepat sasaran<sup>12</sup>. Ketimpangan infrastruktur antarwilayah memperkuat hambatan ini, karena daerah dengan fasilitas transportasi, komunikasi, dan energi yang minim sulit menarik investasi serta mengembangkan potensi lokal. Kondisi tersebut memperlebar disparitas pembangunan dan mengurangi daya saing daerah<sup>13</sup>.

Tantangan besar lainnya muncul dari lemahnya tata kelola keuangan dan akuntabilitas anggaran. Kewenangan fiskal yang diberikan melalui otonomi daerah tidak selalu dibarengi dengan pengawasan yang kuat, sehingga penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi masih sering terjadi. Banyak program pembangunan gagal mencapai target akibat penggunaan dana publik yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah<sup>14</sup>. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana pusat juga menghambat kemandirian fiskal, sebab

---

<sup>11</sup> Sait Abdullah, "Problematisasi Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi* 14 (2023): 47–55.

<sup>12</sup> M. N. A. Jamaluddin, J., & Syahrin, "Studi Komparasi Implementasi Dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah Di Sumatera Dan Papua.," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10, no. 1 (2024): 103–14.

<sup>13</sup> K. Mudhoffar and L. Magriasti, "Ekonomi Politik Energi Terbarukan : Peluang Dan Tantangan Di Indonesia," *Open Multidisciplinary Journal*, 3, no. 1 (2024): 47–52.

<sup>14</sup> Mellisa Anggraini and Mellisa Lawfirm, "Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (2024): 627–38.

## REFORMASI BIROKRASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH

pendapatan asli daerah (PAD) sebagian besar masih rendah. Situasi ini membuat pemerintah daerah kurang memiliki ruang inovasi dan hanya mampu menjalankan program pembangunan administratif tanpa terobosan baru<sup>15</sup>.

Dinamika politik lokal turut memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan otonomi daerah. Kepemimpinan yang kurang berpihak pada kepentingan publik sering memprioritaskan kelompok tertentu, sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak berkelanjutan dan berubah mengikuti siklus politik lima tahunan. Konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif menambah hambatan koordinasi, menyebabkan stagnasi kebijakan, serta memperlambat respons daerah terhadap kebutuhan masyarakat<sup>16</sup>. Kondisi ini membatasi munculnya inovasi kebijakan yang seharusnya diperkuat oleh kewenangan otonomi.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan juga memberi dampak signifikan terhadap kualitas implementasi otonomi daerah. Minimnya akses informasi membuat banyak kebijakan bersifat top down dan tidak mencerminkan kebutuhan lokal secara optimal. Akibatnya, pengawasan publik melemah dan efektivitas penggunaan anggaran menurun. Keseluruhan tantangan ini berdampak pada sulitnya pencapaian tujuan utama otonomi daerah, yaitu pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal. Beberapa daerah bahkan mengalami kesenjangan baru karena ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan. Pemahaman atas berbagai dampak tersebut menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi penguatan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan tata kelola keuangan, pemerataan infrastruktur, penguatan partisipasi publik, dan stabilitas politik lokal.

### **D. Pentingnya Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Kinerja Daerah**

Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional. Tanpa perubahan, birokrasi daerah akan terus dibebani pola kerja lamban, tidak responsif, dan tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah, serta tidak berbelit. Harapan masyarakat terhadap pelayanan modern menuntut pemerintah melakukan transformasi birokrasi secara menyeluruh agar perubahan benar-benar dirasakan di tingkat lokal.

Masalah utama birokrasi daerah banyak bersumber dari budaya kerja internal dan rendahnya kemampuan aparatur dalam beradaptasi terhadap perubahan. Pegawai masih terjebak pola pikir lama, kurang inovatif, dan belum menjadikan kualitas pelayanan sebagai prioritas. Minimnya kreativitas, profesionalisme, serta budaya inovasi membuat layanan publik stagnan dan tidak efisien. Perubahan cara kerja menuntut komitmen aparatur untuk mengembangkan ide baru, memanfaatkan teknologi, dan meninggalkan pola kerja konvensional agar reformasi tidak hanya menjadi wacana, melainkan perubahan nyata yang berdampak pada peningkatan kinerja daerah<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Siburian and Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi : Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna."

<sup>16</sup> Munawar Noor, "Inovasi Dan Orientasi Baru Otonomi Daerah," *Mimbar Administrasi*, 2017, 15–21.

<sup>17</sup> H. Zulfia and A. Frinaldi, "URGENSI PENERAPAN BUDAYA INOVASI BAGI ASN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI," *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 7 (2023): 1–11.

Permasalahan birokrasi tidak hanya menyentuh budaya kerja, tetapi juga terkait struktur organisasi dan tata kelola yang belum efisien. Banyak pemerintah daerah memiliki struktur terlalu gemuk, prosedur tidak jelas, serta mekanisme kerja berlapis-lapis yang memperlambat pelayanan. Ketidakefisienan organisasi, minimnya partisipasi masyarakat, transparansi yang belum optimal, politisasi PNS, serta sistem karier yang tidak sehat semakin memperburuk kualitas pelayanan. Reformasi diperlukan untuk menyederhanakan prosedur, memperjelas pembagian tugas, dan memperbaiki standar pelayanan agar mudah diakses serta menjadi tolok ukur kinerja aparatur<sup>18</sup>. Namun, keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan teknis di unit pelayanan terdepan seperti kelurahan, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan SDM, fasilitas, dan pengawasan.

Kinerja pelayanan publik juga terhambat oleh kompetensi pegawai yang masih rendah, keterbatasan penguasaan teknologi, prosedur yang belum tertata, serta pengawasan yang belum efektif<sup>19</sup>. Karena itu, reformasi birokrasi harus mencakup penguatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Prosedur yang jelas dan terbuka akan menekan praktik pungli, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan prasyarat utama peningkatan kinerja daerah secara menyeluruh melalui tiga aspek yang saling menguatkan:

- a) pembentukan budaya inovasi ASN
- b) pembenahan struktur dan sistem organisasi, dan
- c) penguatan kinerja teknis di kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan.

Ketiganya menjadi fondasi penting untuk membangun birokrasi modern, efektif, dan melayani sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, reformasi birokrasi di tingkat daerah bukan hanya menjadi agenda struktural pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan moral dan institusional demi menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar berorientasi pada masyarakat. Transformasi birokrasi harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang menuntut komitmen, konsistensi, serta kerja sama seluruh elemen mulai dari pimpinan daerah, aparatur, hingga masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan sinergi tersebut, reformasi bukan lagi sekadar slogan administratif, melainkan sebuah gerakan nyata yang mendorong perubahan perilaku, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Melalui upaya yang terarah dan berkesinambungan, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik di era modern.

## Kesimpulan

---

<sup>18</sup> M. F. Adnan, "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Humanus" 12, no. 2 (2013): 196-203.

<sup>19</sup> Febriant Rizaldy, Adi Sastra, and Eka Purnamaningsih, "Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya English Title: Optimization of Bureaucratic Reform on Service Performance of Airlangga Urban Village, Gubeng Subdistrict, Surabaya City," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 1 (2024): 309–24.

## REFORMASI BIROKRASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada era otonomi daerah. Berbagai tantangan seperti budaya hierarkis, rendahnya profesionalisme aparatur, politisasi birokrasi, lemahnya tata kelola keuangan, serta kualitas pelayanan publik yang belum optimal menunjukkan bahwa kapasitas daerah masih perlu diperkuat. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih sederhana, sumber daya manusia yang kompeten, sistem pelayanan yang efektif, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penguatan inovasi, penggunaan teknologi informasi, dan penerapan standar pelayanan publik menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi modern yang mampu merespons kebutuhan masyarakat. Dengan reformasi yang berkelanjutan dan terarah, otonomi daerah mampu berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Referensi

- Abdullah, Sait. "Problematika Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi* 14 (2023): 47–55.
- Adnan, M. F. "Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Humanus" 12, no. 2 (2013): 196-203.
- Adrian, Syarifuddin Jurdi, and Syahrir Karim. "Gagasan Politik Wahdah Islamiyah Dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024." *Jurnal Studi ALQURAN-HADIS Dan Pemikiran Islam*, 2025, 2745–3812.
- Anggraini, Mellisa, and Mellisa Lawfirm. "Optimalisasi Good Governance Melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (2024): 627–38.
- Habsy. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1 (2017): 90–100.
- Haning, M. T. "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2018, 25–37.
- Hartanto, Rizal Seota Wahyu, and Hasan Dani. "STUDI LITERATUR : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN SOFTWARE AUTOCAD Rizal." *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan* 6, no. 1 (2020).
- Irawan, Bambang, Dimas Achmad Armadani, Program Studi, and Administrasi Publik. "REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE." *JPA (Journal of Public Aministration)* 7 (2021): 1–17.
- Jamaluddin, J., & Syahrin, M. N. A. "Studi Komparasi Implementasi Dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah Di Sumatera Dan Papua." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10, no. 1 (2024): 103–14.
- Lestari, Ade. "Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 1 (2024): 77–91.
- Mudhoffar, K., and L Magriasti. "Ekonomi Politik Energi Terbaru : Peluang Dan Tantangan Di Indonesia." *Open Multidisciplinary Journal*, 3, no. 1 (2024): 47–52.
- Nasihah, Durotun, Anis Fauzi, and Abdul Muin. "Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Ilmu Kependidikan* 12, no. 1 (2023): 19–28. <https://doi.org/10.33506/jq.v12i1.2238>.
- Noor, Munawar. "Inovasi Dan Orientasi Baru Otonomi Daerah." *Mimbar Administrasi*,

2017, 15–21.

- Rizaldy, Febriant, Adi Sastra, and Eka Purnamaningsih. “Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya English Title: Optimization of Bureaucratic Reform on Service Performance of Airlangga Urban Village, Gubeng Subdistrict, Surabaya City.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 1 (2024): 309–24.
- Siburian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya. “Korupsi Dan Birokrasi : Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>.
- Wulandari, Sri. “Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era Society 5.0.” *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4 (2023): 51–61.
- Yati, A. M. “Strategi Da’i Perkotaan Dalam Mengimplementasikan Syariat Islam Secara Kaffah Di Kota Banda Aceh.” *JURNAL AT-TAUJIH BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM* 4, no. 1 (2021): 49–70.
- Zulfia, H., and A. Frinaldi. “URGENSI PENERAPAN BUDAYA INOVASI BAGI ASN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI.” *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 7 (2023): 1–11.